

KETUA REDAKSI

Nasiwan

SEKRETARIS REDAKSI

Suhadi Purwanto

EDITOR

Ajat Sudrajat

DEWAN PAKAR/MITRA BESTARI

Anik Gufron, Sukadi, Syafi'i Maarif

DEWAN REDAKSI

Muhsinatun Siasah, Moerdiyanto, Sardiman A.M, Marzuki, Djihad Hisyam

PEMASARAN DAN SIRKULASI

Trina Wahjuni, Perdaning Widyanti

ALAMAT REDAKSI

Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta,
Kampus Karangmalang, Yogyakarta.

Telp. (0274) 548202, 586168 psw. 247, 386, 384.

Email: jurnaluny@yahoo.com atau iwan1uny@yahoo.com

SOCIA adalah jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) bekerja sama dengan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia (HISPISI). Jurnal yang diterbitkan sejak tahun 2004 ini dimaksudkan sebagai media publikasi, penelitian, pertukaran ide, dan kajian, di samping sebagai penyalur informasi dan pengembangan ilmu-ilmu sosial.

SOCIA mengangkat tema-tema khusus dan memuat tulisan ilmiah dan ilmiah populer yang ditujukan untuk kalangan akademisi, ahli, praktisi, dan masyarakat pada umumnya. Tulisan-tulisan yang dimuat dalam jurnal **SOCIA** telah melalui mekanisme penyuntingan seperlunya tanpa mengubah substansi naskah asli. Isi tulisan yang dimuat dalam jurnal ini merupakan pendapat personal dan menjadi tanggung jawab masing-masing penulisnya.

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi | iii

NURWANTO

Akses Pendidikan Dasar dan Menengah untuk Korban Gempa Bumi di Daerah Istimewa Yogyakarta | 109-136

SUKADI

Pendidikan IPS Sebagai Rekonstruksi Pengalaman Budaya Berbasis Ideologi *Tri Hita Karana* | 137-157

ASEP NURDIN

Model Portofolio untuk Pembelajaran Pendidikan Lingkungan yang Terintegrasi dalam Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial | 158-177

SUHARTONO

Penerapan Model Pembelajaran "Home Family Learning" dalam Pelajaran Sosiologi di SMP: Suatu Pendekatan Berbasis Masyarakat | 178-194

SARKADI

Penerapan Model Pembelajaran "Cooperative Learning" pada Mata Pelajaran Ilmu-ilmu Sosial | 195-208

Indeks | 209

Para Penulis | 212

Ketentuan Penulisan dan Pengiriman Naskah | 213

AKSES PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH UNTUK KORBAN GEMPA BUMI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NURWANTO

08121571447

Abstract

This study investigates the continuity of access to basic and middle education for earthquake victims in Daerah Istimewa Yogyakarta. This study is a descriptive-quantitative study. The research subjects are the students parents, principals, local government, the education office and the DPRD. The results of this study indicate that earthquake contributed to the number of students who drop out of school. The number of drop out students can be suppressed by the existence of a solution-government program. However, if the program is withdrawn, there will be swelling of the number of drop out students. The results of this study also emphasize that the role of schools in developing communication with stakeholders needs to be intensified and the sources of capital needs to be expanded to restore the access to education.

Keywords: access, education, earthquake

Abstrak

Penelitian ini menyelidiki tentang kelangsungan akses pendidikan dasar dan menengah bagi korban gempa bumi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kuantitatif. Subjek penelitian meliputi orangtua pembelajar, kepala sekolah, pemerintah daerah, dinas pendidikan dan DPRD di Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gempa bumi berperan dalam meningkatnya jumlah pembelajar yang putus sekolah. Jumlah pembelajar yang putus sekolah dapat ditekan dengan adanya program pemerintah yang solutif. Akan tetapi jika program itu dicabut, akan terjadi pembengkakan angka pembelajar yang putus sekolah. Hasil penelitian juga menekankan agar peran sekolah dalam membangun komunikasi dengan para pemangku kepentingan diintensifkan dan perlu dilakukan perluasan sumber-sumber kapital untuk memulihkan akses pendidikan.

Kata kunci: akses, pendidikan, gempa

PENDAHULUAN

Akses dan partisipasi masyarakat yang merata dalam pendidikan menjadi *entry point* untuk menciptakan bangsa yang berkualitas di masa depan. Fakta bahwa pendidikan menentukan kualitas bangsa didukung oleh data dari Human Development Index (HDI), yang menyatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia berada pada peringkat ke-104 (1995), ke-109 (2000), ke-110 (2002), ke-112 (2003), ke-111 (2004) dan ke-110 (2005) dari sekitar 170-an negara (Depdiknas, 2005, h. 16).

Berdasarkan laporan The World Economic Forum (Swedia, 2000), Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia dan dalam sepuluh tahun terakhir negara ini masih jauh di bawah Singapura, Malaysia, Filipina dan Thailand (*Kompas*, 6/11/04).

Pemerataan dan kelangsungan akses pendidikan di tanah air sebagai daya dukung kualitas bangsa menjadi sedemikian penting meski dewasa ini masih diliputi persoalan. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) 2004 yang dihimpun Depdiknas (2005, h. 16-17), dari sekitar 28,2 juta anak usia 0-6 tahun, baru 7,2 juta (25,3%) yang memperoleh layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 7,12 tahun dan usia 13-15 tahun sudah mencapai 96,8% dan 83,5%.

Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar 3,2% anak usia 7-12 tahun dan sekitar 16,5% anak usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah, baik karena belum pernah sekolah, putus sekolah, atau tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Sementara itu, APS penduduk usia 16-18 tahun sudah mencapai 53,5% dan partisipasi penduduk usia 19-24 tahun di perguruan tinggi mencapai 14,6%.

Berdasarkan informasi Balitbang Depdiknas tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan dari pendidikan dasar, menengah hingga pendidikan tinggi, angka partisipasinya semakin rendah (*Kompas*, 6/2/02; Mastuhu, 2003, h. 1).

Problem kelangsungan pendidikan di atas juga sesuai dengan laporan UNFPA (Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-bangsa) pada tahun 2005. Laporan tersebut berkaitan dengan keadaan penduduk dunia 2005 dan janji kesetaraan, kesetaraan jender, kesehatan reproduksi, dan tujuan pembangunan milenium.

Laporan tersebut menyatakan bahwa jumlah penduduk berusia sekolah dasar di Indonesia yang melanjutkan ke jenjang lanjutan relatif rendah dibandingkan negara-negara maju lainnya di Asia Tenggara dan sedikit lebih baik dibandingkan Kamboja, Laos, dan Myanmar (*Bisnis Indonesia*, 1/11/05).

Naskah Akademik UU Sistem Pendidikan Nasional 2003 menjelaskan bahwa ketidakmerataan dan problem kelangsungan memperoleh kesempatan pendidikan terutama terjadi pada kelompok-kelompok: (1) masyarakat pedesaan dan atau masyarakat terpencil, (2) keluarga yang kurang beruntung secara ekonomi, sosial dan budaya, (3) wanita, dan (4) penyandang cacat. Secara lebih mendalam, temuan Suryadi (2000) membuktikan bahwa terdapat hubungan yang sangat nyata antara variabel wilayah di Indonesia dengan variabel alasan tidak bersekolah yang di antaranya disebabkan oleh kesulitan biaya sebagai faktor dominan.

Temuan ini selaras dengan data BPS 2003 yang menunjukkan bahwa sebagian besar (76%) keluarga menyatakan penyebab utama anak putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah adalah karena alasan ekonomi, yang di antaranya karena tidak memiliki biaya sekolah (67%) serta harus bekerja dan mencari nafkah (8,7%) (Depdiknas, 2005, h. 17).

Adanya kesulitan biaya pendidikan tersebut tentu saja dipicu oleh kondisi ekonomi yang lemah yang bertalian erat dengan persoalan kemiskinan. Secara teoretik, kemiskinan dapat saja berlangsung sebagai warisan sosiokultural, konstruksi sosial yang tidak adil dan sebab-sebab lain seperti bencana alam. Bencana alam yang melanda berbagai

wilayah di negeri ini, seperti banjir, kebakaran, letusan gunung, gempa bumi, dan tsunami, ikut menyumbang pada angka kemiskinan yang semakin membengkak yang pada akhirnya mempengaruhi angka partisipasi dan kelangsungan akses pendidikan.

Bencana gempa bumi dengan kekuatan 5,9 skala richter yang melanda wilayah DIY dan Jawa Tengah pada tanggal 27 Mei 2006 telah menelan korban jiwa dan meluluh-lantakkan rumah, gedung dan berbagai fasilitas publik. Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Satkorlak, korban meninggal di DIY mencapai 5000-an jiwa, yang tersebar di Bantul, Sleman, Yogyakarta, Kulon Progo, dan Gunung Kidul (Data Satkorlak Juni 2006).

Menurut data Kimpraswil DIY (hingga Mei 2007), jumlah rumah rusak berat di DIY mencapai 160.109 buah, rusak sedang 85.356 buah, dan rusak ringan 168.827 buah (*Kedaulatan Rakyat*, 21/05/07). Menurut Dinas Sosial DIY (2005), Bantul merupakan wilayah terparah dengan jumlah korban meninggal 4.203 jiwa, korban mengungsi 781.196 dan kerusakan rumah (ringan hingga berat) mencapai ratusan ribu rumah yang tersebar di sejumlah kecamatan. Data tersebut disajikan dalam Tabel 1 di bawah ini.

Korban meninggal di Kota Yogyakarta mencapai 185 orang (Data Satkorlak Juni 2006) dan jumlah rumah rusak

Tabel 1.
Rekapitulasi Data Korban Gempa Tektonik
Kabupaten Bantul

| No | Kecamatan | Korban | Jumlah Korban | | Jumlah Kondisi Rumah | | |
|----|-------------|--------|---------------|---------|----------------------|--------|--------|
| | | | KK | Jiwa | Rusak Total | Rusak | Rusak |
| 1 | Dlingo | 18 | 9,451 | 37,462 | 1,377 | 3,38 | 4,72 |
| 2 | Piyungan | 243 | 12,182 | 43,684 | 5,514 | 4,801 | 3,135 |
| 3 | Pleret | 519 | 12,226 | 37,428 | 8,139 | 2,322 | 1,438 |
| 4 | Banguntapan | 236 | 23,935 | 81,425 | 5,557 | 8,232 | 7,452 |
| 5 | Bantul | 247 | 20,216 | 59,24 | 4,708 | 7,338 | 3,301 |
| 6 | Imogirt | 318 | 14,57 | 56,805 | 5,664 | 5,354 | 4,471 |
| 7 | Jetts | 830 | 15,507 | 50,98 | 11,356 | 2,61 | 664 |
| 8 | Sewon | 462 | 24,307 | 95,592 | 8,281 | 8,496 | 6,004 |
| | Jumlah | 4,203 | 223,12 | 781,196 | 71,763 | 71,372 | 66,359 |

Sumber: Dinas Sosial DIY, 2005.

berat mencapai 6000-an. Sementara itu, jumlah sekolah yang rusak berat di Sleman 446 buah, di Bantul 914 buah, di Gunung Kidul 428 buah, di Kulon Progo 312 buah, dan di Kota Yogyakarta 275 buah.

Data World Bank (2006) menunjukkan bahwa untuk sementara waktu, lebih dari 650.000 orang yang bekerja di sektor yang terkena dampak gempa bumi paling besar, yakni hampir 90% dan terpusat di usaha kecil dan menengah, mengalami kesulitan ekonomi. Data yang dihimpun oleh *Kedaulatan Rakyat* (3 Agustus 2006) menyebutkan bahwa angka pengangguran DIY sebelum gempa bumi sekitar 87.000 orang dan setelah gempa bumi diperkirakan mencapai 140.000 orang pengangguran.

Dampak melemahnya sektor ekonomi terhadap akses pendidikan pun menemukan momentumnya. Riset sebelumnya telah memperlihatkan adanya dampak penurunan angka putus sekolah siswa SD, SMP dan SMA sepanjang tahun-tahun krisis ekonomi (Darmaningtyas, 1999, h. 32).

Sebagai akibat dari bencana gempa bumi di Yogyakarta, dapat diprediksikan bahwa angka putus sekolah (*drop out*) di DIY semakin meningkat disebabkan semakin melemahnya sektor sosial, terutama anak yang ditinggal mati oleh orangtuanya, dan sektor ekonomi karena hilangnya mata pencaharian.

Secara nasional, berdasarkan data Balitbang Diknas (2003), angka putus sekolah untuk SD 2,97%, SMP 2,42%, SMA 3,06% dan Perguruan Tinggi 5,9% (Suyanto, 2005, h. 11). Sementara itu, data Balitbang Diknas 2004 menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin tinggi pula angka putus sekolah, sehingga semakin rendah pula angka efisiensi pengelolaan pendidikan (Depdiknas, 2005. H. 32). Dikhawatirkan angka *drop out* di wilayah DIY sebagai akibat bencana gempa bumi juga semakin tinggi. Oleh karena itu kebijakan pemerintah yang responsif-antisipatif dan partisipatif terkait dengan kelangsungan pendidikan dasar perlu dikembangkan secara cermat.

Pengambilan keputusan yang sepihak dari pemerintah tanpa memperhatikan kebutuhan dan masalah nyata yang dihadapi oleh masyarakat DIY dan sekitarnya setelah gempa bumi telah menimbulkan banyak masalah. Sebagai contoh adalah pembagian jatah hidup dan kasus dana rekonstruksi yang salah sasaran sehingga dalam pemberian bantuan untuk pendidikan pun dimungkinkan dapat terjadi penyelewengan dan salah urus. Pengambilan keputusan lainnya yang sangat problematik adalah ketidakpekaan sebagian besar institusi pendidikan yang melakukan pungutan pada penerimaan siswa baru mengingat proses penerimaan siswa baru berlangsung tidak lama setelah terjadinya gempa (www.ireyoga.org). Berangkat dari kesaksian tersebut, maka dapat dipertanyakan

bagaimana sebenarnya kebijakan atau langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah dan sekolah dalam merespons kondisi masyarakat pasca gempa bumi tersebut.

Riset terdahulu (*prior research*) menunjukkan adanya bentuk pengambilan keputusan atau kebijakan pemerintah Bantul dalam bidang pendidikan yang tidak partisipatif alias masih elitis (Nasiwan, 2003). Di antara pengambilan keputusan yang elitis antara lain adalah perumusan visi dan misi yang tidak melibatkan *stakeholders* pendidikan, kebijakan studi lanjut yang tidak diiringi dengan dukungan kelangsungannya bagi para guru, di antaranya jam mengajar yang masih padat, dan pengalokasian anggaran pendidikan yang tidak selaras dengan kebutuhan nyata masyarakat, terutama warga miskin. Riset ini sekaligus menajamkan makna pentingnya kebijakan yang partisipatif atau melibatkan masyarakat dan *stakeholders* yang terkait sekaligus transformatif yakni benar-benar mengubah kondisi ke arah yang lebih baik.

Riset terdahulu lainnya dilakukan ditakukan oleh Pusat Studi Kependudukan dan Otonomi Daerah UGM (2003, h. 194) terkait dengan pengambilan keputusan dan kebijakan pendidikan di sejumlah daerah di Indonesia yang menunjukkan belum aspiratifnya pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah dan dinas pendidikan. Hal itu terjadi karena pemerintah lebih

menekankan aspirasi kepala sekolah dan kurang melibatkan orangtua pembelajar. Pada tingkat implementasi, dukungan dana dari pemerintah untuk pembiayaan pendidikan pun dirasakan sangat kecil jika dibandingkan dengan beban biaya yang harus ditanggung oleh keluarga (Dedi Supriadi, 2004, h. 234).

Temuan di atas sekaligus menjadi pertimbangan potensial dan kontekstual untuk melihat peran pemerintah DIY terutama di Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta dalam menangani kelangsungan akses pendidikan bagi korban gempa bumi yang secara sosial dan ekonomi berada dalam keadaan lemah. Riset ini mencoba mencari alternatif penentuan kebijakan tentang kelangsungan akses pendidikan dasar dan menengah bagi korban gempa bumi. Kondisi ini dibuktikan dengan upaya-upaya dan kebijakan pemerintah yang masih terkonsentrasi pada rekonstruksi fisik termasuk di dalamnya infrastruktur pendidikan.

PERSPEKTIF TEORETIS

1. Kelangsungan Akses Pendidikan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005, h. 636-637) menyatakan bahwa kata "kelangsungan" sepadan dengan kata "kelanjutan", "ketahanan", dan "kesinambungan", yang berarti suatu aktivitas atau perihal yang berlanjut

atau berkembang. Dengan demikian, kelangsungan akses pendidikan adalah kelanjutan, ketahanan dan kesinambungan untuk memperoleh kesempatan pendidikan bagi masyarakat.

Pengertian pendidikan dapat ditinjau dari tiga cakupan. Pertama, cakupan luas yang menyatakan bahwa pendidikan adalah hidup itu sendiri yang berupa pengalaman belajar dalam segala lingkungan dan segala waktu. Kedua, cakupan sempit yang menyatakan bahwa pendidikan adalah pengajaran yang diselenggarakan di sekolah formal. Ketiga, cakupan alternatif/luas terbatas (akomodasi) yang menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat (Redja Mudyahardjo, 2002, h. 3-16).

Cakupan pendidikan alternatif di atas sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengakui dan meneguhkan adanya pendidikan formal, informal dan non-formal dalam sistem pendidikan nasional. Kelangsungan untuk memperoleh kesempatan pendidikan merupakan salah satu persoalan pendidikan nasional yang memerlukan perhatian serius, di samping persoalan peningkatan mutu, efisiensi, peran serta masyarakat dan akuntabilitas (Fasli Jalal & Dedi Supriadi,

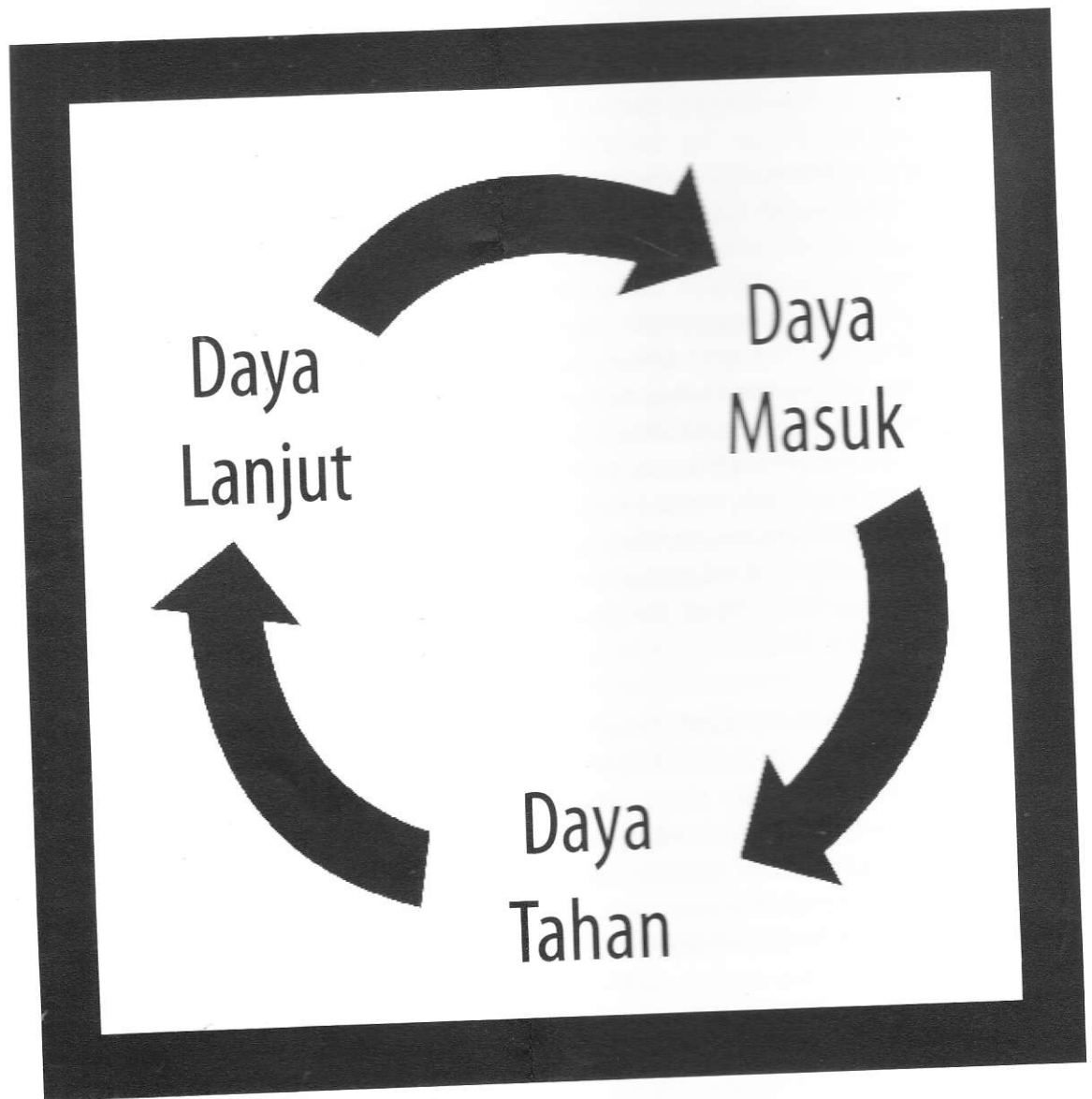
2001, h. mocvii). Tanpa adanya kelangsungan akses pendidikan, maka peningkatan kualitas manusianya dalam pendidikan menjadi sesuatu yang mustahil dilakukan.

Ukuran konseptual tentang kelangsungan akses pendidikan dapat dilihat dari daya masuk, daya tahan, dan daya lanjut pendidikan. Daya masuk merupakan kemampuan untuk menempuh pendidikan dalam kurun waktu tertentu. Daya tahan merupakan kemampuan menjalani pendidikan sehingga tidak menyerah dan putus pendidikan (*drop out*) di tengah jalan. Daya lanjut mencerminkan kemampuan dan kemampuan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Lingkaran ketiga ukuran konseptual ketangsongungan akses pendidikan tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.

Indikator (ukuran operasional) dari kelangsungan akses pendidikan yang dimaksud di atas juga menganut prinsip tuntas dalam pendidikan, yakni angka partisipasi (masuk sekolah), angka mengulang kelas, angka putus sekolah, angka kebutuhan, angka melanjutkan dan angka penyelesaian (Saiful Anam, 2005, h. 193). Keenam angka dalam kelangsungan pendidikan tersebut merupakan satu kesatuan dalam sistem pendidikan.

Desentralisasi pendidikan diharapkan akan meningkatkan partisipasi

Gambar 1.
Ukuran Kelangsungan Akses Pendidikan



Tabel 2.
Lembaga Pendidikan Menurut Jenjangnya

| | |
|----------------------------|---|
| Pendidikan Dasar | SD/ MI SMP/ MTs |
| Pendidikan Menengah | SMA SMK MA |
| Pendidikan Tinggi | Universitas Akademi Politeknik Sekolah Tinggi Institut |

pemerintah daerah dan masyarakat sehingga pemerataan dan akses pendidikan secara menyeluruh akan lebih cepat tercapai.

Hal ini disebabkan pemerintah daerah akan lebih tahu tentang kebutuhan masyarakat yang mereka layani, di samping mempunyai kewenangan penuh untuk merencanakan, membiayai dan mengeksekusi rencana tersebut. Namun, karena kemampuan daerah sangat bervariasi, maka perbedaan akses pendidikan dan kelangsungannya antara kabupaten dan kota di Indonesia yang sudah terjadi pada awal pelaksanaan desentralisasi akan semakin melebar.

Akibatnya, bila tidak ada dukungan khusus untuk daerah-daerah tertinggal dan daerah yang kerap terkena bencana, maka ketimpangan akses antardaerah akan semakin besar dan tujuan pemerataan di bidang pendidikan akan sulit tercapai. Karena tingkat pendidikan berkaitan dengan tingkat penghasilan, maka dalam jangka panjang, keadaan di atas akan menghasilkan perbedaan tingkat kesejahteraan yang cukup besar antardaerah.

2. Pendidikan Dasar dan Menengah

Istilah pendidikan dasar dan menengah berdasarkan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional merupakan istilah yang merujuk pada jenjang

pendidikan formal. Jenjang pendidikan merupakan tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan (pasal 1 tentang Ketentuan Umum nomor 8).

Adapun jenjang pendidikan yang dimaksud di sini adalah jenjang pendidikan formal yang meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi (pasal 14). Jenjang pendidikan formal di Indonesia menurut UU No. 20 Tahun 2003 adalah sebagai berikut yang terlihat dalam Tabel 2.

3. Gempa Bumi dan Kemiskinan

Pendekatan kajian atas fenomena kemiskinan sangat variatif meskipun dapat disederhanakan ke dalam dua pendekatan secara umum, yaitu tinjauan pendekatan kultural (alami) dan pendekatan kultural (rekayasa). Pendekatan kultural memandang bahwa kemiskinan merupakan sesuatu yang tidak dapat diubah dan hanya dapat diterima begitu saja (given) oleh seseorang atau komunitas masyarakat.

Penyebab dari kemiskinan berdasarkan pendekatan ini adalah karena warisan dan ketidakmampuan seseorang untuk mengembangkan potensi dirinya untuk maju dan berkembang. Tinjauan kultural memandang bahwa kemiskinan merupakan sesuatu yang dapat diubah melalui pendekatan rekayasa dan tindakan sipil

Tabel 3.
Perbandingan Bencana-Bencana Internasional

| Negara | Bencana | Tanggal | Korban | Kerugian | Kerugian (Juta) |
|------------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------------------|
| Turki | Gempa Burnt | 17Agust 99 | 17.127 | 8.500 | 10.281 |
| Indonesia (Aceh) | Tsunami | 26 Des 2004 | 165.708 | 4.450 | 4.747 |
| Honduras | Topan Mitch | 25 Ok-8 Nov 98 | 14.600 | 3.800 | 4.698 |
| Indonesia (DIY-Jateng) | Gempa Burnt | 27 Mei 2006 | 5.716 | 3.134 | 3.134 |
| India (Gujarat) | Gempa Bumi | 26 Jan 2001 | 20.005 | 2.600 | 2.958 |
| Pakistan | Gempa Bumi | 8 Okt 2005 | 73.338 | 2.851 | 2.942 |
| Thailand | Tsunami | 26 Des 2004 | 8.345 | 2.198 | 2.345 |
| Sri Lanka | Tsunami | 26 Des 2004 | 35.399 | 1.454 | 1.551 |
| India | Tsunami | 26 Des 2004 | 16.389 | 1.224 | 1.306 |

Sumber: Pusat Kesiapan Bencana Asia, Thailand; ECLAC, EM-DAT, Bank Dunia.

sosial yang tidak menguntungkan bagi seseorang atau komunitas tertentu.

Fenomena gempa bumi merupakan peristiwa alam yang berada di luar kehendak pribadi dan rekayasa sistem sosial. Gempa bumi merupakan peristiwa alam yang merupakan kehendak Sang Adi Kodrati (Tuhan) namun dampaknya sangat dirasakan oleh orang atau masyarakat yang ditimpà kerugian dan kerusakan akibat dari dampak gempa bumi. Dampak kerusakan dan kerugian akibat gempa secara internasional dapat dilihat dalam Tabel 3 di atas.

Analisis World Bank (2006) menunjukkan bahwa dampak gempa bumi di DIY dan Jateng secara sosial dan ekonomi dapat dijelaskan sebagai berikut. Kemiskinan, yang telah melampaui rata-rata nasional di daerah rawan bencana alam, akan diperparah oleh gempa bumi ini. Hampir 880.000 orang miskin tinggal di kawasan yang terkena dampak gempa bumi.

Diperkirakan, 66.000 orang lagi mungkin akan jatuh ke dalam kemiskinan dan 130.000 mungkin kehilangan pekerjaan mereka sebagai akibat gempa bumi tersebut. Dampak terhadap hilangnya pekerjaan khususnya parah di bidang jasa maupun manufaktur berskala kecil. Perkiraan awal mengisyaratkan bahwa produk domestik bruto daerah ini bisa jatuh 5%, dengan penyusutan ekonomi 18% di kabupaten-kabupaten yang paling menderita.

Perumahan dan pelayanan transisi akan terkonsentrasi terutama pada lokasi-lokasi rumah yang sudah ada. Suatu survei kilat memperlihatkan bahwa 74% dari keluarga-keluarga yang rumahnya hancur total tinggal di dalam tenda-tenda di atas tanah sendiri. Dalam keadaan seperti ini, sangat mendesak untuk memastikan adanya pemulihan cepat untuk kebutuhan dasar berupa air dan sanitasi di kawasan-kawasan yang terkena dampak gempa bumi.

Beberapa desa melaporkan bahwa mutu dan rasa air telah merosot meskipun persediaan air bersih masih utuh. Kaum perempuan dewasa dan anak perempuan terus mengeluhkan kebutuhan akan pakaian dalam, pembalut, alat pembersih, dan peralatan masak.

Trauma psikologis akibat bencana ini seharusnya tidak diremehkan. Laporan-laporan kualitatif menunjukkan bahwa tingkat trauma memang tinggi di kawasan-kawasan yang terkena dampak parah. Stres secara signifikan diperparah oleh ancaman letusan Gunung Merapi. Meskipun masyarakat cepat bergerak untuk memastikan adanya pemondokan darurat yang memadai, mungkin diperlukan beberapa waktu sebelum keluarga-keluarga tersebut siap untuk terlibat dalam kegiatan perencanaan.

Hubungan sebab-akibat antara gempa bumi dengan sistem ekonomi yang pada akhirnya mempengaruhi kelangsungan akses pendidikan bukan

berarti mengabaikan faktor struktural atau rekayasa sistem sosial yang mempengaruhi kemiskinan.

Berdasarkan analisis struktural, corak pembangunan di Indonesia selama ini menerapkan paradigma developmentalisme yang hanya menguntungkan kelas menengah ke atas dan meminggirkan masyarakat pada umumnya (Mansour Fakih, 1996, h. 80). Dengan demikian, masyarakat korban gempa bumi yang secara sosial dan kultural sebelum peristiwa gempa bumi berlangsung berada dalam alam kemiskinan, maka setelah gempa bumi kondisinya kian menderita.

4. Teori Kebijakan Publik Transformatif

"Kebijakan" (*policy*) berasal dari bahasa Yunani, Sansekerta, dan Latin. Akar kata ini dalam bahasa Yunani dan Sansekerta adalah "polis" (negara-kota) dan "pur" (kota) yang kemudian dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi "politia" (negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris Pertengahan "politick", yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi.

Studi atau analisis kebijakan telah berlangsung lama. Studi ini bertujuan untuk menyediakan informasi bagi pembuat kebijakan untuk dijadikan bahan pertimbangan yang masuk nalar guna menemukan pemecahan masalah kebijakan (William N. Dunn, 1998, h. 87). Dengan demikian, analisis kebijakan

memiliki dasar orientasi praktis yang dalam banyak hal menjadikannya sama dengan ilmu sosial terapan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005, h. 149) mengartikan kebijakan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak, misalnya dalam pemerintahan atau organisasi. Selanjutnya, kebijakan yang dimaksud di sini adalah kebijakan publik, yakni kebijakan pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat secara luas atau bagi publik.

Isu-isu yang terangkat dalam suatu kebijakan publik selalu dinilai dari arah partisipasi dan keterlibatan masyarakat baik dalam perumusan, pelaksanaan, implementasi maupun penilaian. Hal ini terjadi seiring dengan perkembangan politik dan pemerintahan yang semakin lama cenderung mengarah pada alam demokratisasi.

Model analisis publik demikian secara historis muncul pasca-Perang Dunia II hingga masyarakat pascaindustri yang ditandai mulai dari kelesuan ekonomi, perang, hingga ketimpangan sosial-ekonomi. Pada era pascaindustri, mulai terjadi pelembagaan advokasi kebijakan yang lebih bernilai politis atau untuk perubahan daripada sekedar analisis dalam pengertian ilmiah semata.

Politik dan pemerintahan dewasa ini juga dihadapkan pada arus advokasi

kebijakan publik yang secara empiris-objektif melakukan kajian sekaligus pendampingan demi tercapainya hak-hak sosial dan kultural masyarakat. Dari perspektif ini, maka teori tentang advokasi kebijakan publik menjadi signifikan untuk melihat fakta tentang kondisi sosial ekonomi di tanah air pada umumnya maupun kondisi masyarakat pascagempa bumi.

Mansour Fakih (1996, h. 23) memberikan inspirasi tentang perlunya suatu arah kebijakan publik yang transformatif. Ada tiga arus kebijakan berdasarkan respon publik, yaitu sebagai berikut.

- a) Konformisme, yakni arah kebijakan yang hanya menyesuaikan dengan sistem dan keputusan politik yang telah ada.
- b) Reformisme, yakni arah kebijakan yang hanya menekankan perlunya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- c) transformatif, yakni arah kebijakan yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan perubahan sosial dan mempengaruhi kebijakan publik secara produktif dan adil.

Berangkat dari tiga hal di atas, maka untuk kepentingan konstruksi kebijakan pendidikan, termasuk di dalamnya adalah kebijakan tentang kelangsungan akses pendidikan dasar dan menengah bagi korban gempa bumi, diperlukan model kebijakan publik yang transformatif.

5. Kerangka Konseptual

Adanya fakta bahwa angka partisipasi pendidikan di tanah air secara umum tidak merata dan kurang berkelanjutan dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi merupakan prakondisi semakin menurunnya daya masuk, daya tahan, dan daya lanjut masyarakat dalam pendidikan terutama setelah terjadi gempa bumi di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 2006.

Kelangsungan akses pendidikan dasar dan menengah diasumsikan menurun dengan menguatnya angka kemiskinan dan pengangguran. Di samping itu, upaya-upaya dan kebijakan pemerintah yang masih terkonsentrasi pada rekonstruksi fisik termasuk di dalamnya infrastruktur sekolah semata ikut mempengaruhi persoalan kelangsungan akses pendidikan yang bertalian dengan problem sosial dan ekonomi yang muncul.

Gejala yang problematik, seperti kasus ditemukannya sebagian besar sekolah di daerah gempa bumi yang masih memungut biaya masuk sekolah bagi masyarakat yang baru saja terkena musibah gempa bumi, menandakan adanya keputusan dan arah kebijakan yang belum terjalin dan terkonstruksi dengan baik.

Pendekatan kebijakan satu arah dari pemerintah dan kebijakan yang parsial sudah tidak mencukupi lagi. Diperlukan konstruksi kebijakan yang berhaluan

transformatif, yakni kebijakan untuk perubahan yang mengubah kondisi masyarakat menjadi kondisi yang semakin adil dan berkelanjutan. Dalam konteks kelangsungan akses pendidikan dasar dan menengah bagi korban gempa bumi di DIY, dibutuhkan kebijakan yang transformatif tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kebijakan. Penelitian kebijakan (*policy research*) adalah penelitian yang membantu merumuskan kebijakan-kebijakan publik. Penelitian kebijakan menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan dan aksi oleh pemerintah untuk masyarakat, perubahan kebijakan, dan timbal-balik program (Encyclopedia of Educational Research, 1992, h. 1013).

Penelitian ini juga dimaksudkan untuk menyediakan kemungkinan adanya informasi tentang kebijakan pemerintah terkait dengan kelangsungan akses pendidikan dasar dan menengah bagi korban gempa di DIY dan perlunya kebijakan kelangsungan akses pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nyata di tengah masyarakat sehingga sebuah penelitian kebijakan akan menghasilkan berbagai rekomendasi penting untuk keputusan/kebijakan di masa yang akan datang. Sistem kerja suatu kebijakan memuat komponen-

komponen yang bersifat dinamis, multi-linear dan komplementatif.

Penelitian kebijakan ini akan dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau (Nana S. Sukmadinata, 2005, h. 54).

Dengan demikian, penelitian ini ditujukan untuk memberikan gambaran secara nyata tentang suatu keadaan, yakni tentang kelangsungan akses pendidikan dasar dan menengah bagi korban gempa di Bantul dan Yogyakarta. Selanjutnya, sebagai riset kebijakan, maka gambaran tentang keadaan dan harapan di lapangan digunakan untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang perlu dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, yang dalam konteks ini adalah pemerintah baik pusat maupun daerah.

Area yang menjadi sampel penelitian ini adalah kecamatan yang memiliki karakteristik sebagai lokasi yang parah terkena dampak gempa bumi berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Sosial DIY (2005). Selanjutnya, dengan didasarkan pada karakteristik tersebut, pendidikan dasar (SD dan SMP) serta pendidikan menengah (SMA)-nya sebagai sampel diambil secara acak (random) untuk mewakili populasi.

Tabel 4.
Penyebab Drop Out Secara Umum Tahun Ajaran
2006/2007 (Bantul)

| Kab/ Kota | Penyebab DO | SD | SMP | SMA | Frekuensi |
|----------------------------|------------------------------------|----|-----|-----|-----------|
| B A N T U L | Kondisi ekonomi | 7 | 12 | 45 | 64 (66%) |
| | Kondisi fisik (meninggal/cacat) | 5 | 0 | 1 | 64 (66%) |
| | Kondisi psikis (depresi) | 0 | 0 | 0 | 0 (0%) |
| | Lainnya | 10 | 4 | 13 | 27 (28%) |
| | Jumlah | | | | 97 (100%) |

Sebagai faktor penentu yang lain, komposisi sekolah negeri dan swasta juga ikut dipertimbangkan untuk penentuan sampel. Sementara itu, siswa/orang tua yang akan menjadi sampel ini tentu saja subjek yang masuk kategori sebagai korban gempa bumi Mei 2006. Dengan demikian, sampel juga ditentukan secara *purposive*.

PEMBAHASAN

Pemerataan pendidikan, termasuk di dalamnya kelangsungan akses pendidikan, masih menjadi persoalan mendasar di negara ini. Sebab utama yang melatarbelakanginya adalah faktor kemiskinan yang berakibat pada lemahnya kemampuan masyarakat dalam mengakses lembaga pendidikan. Keadaan ini semakin parah ketika serentetan bencana alam, termasuk gempa bumi, melanda negeri ini.

Salah satu bencana gempa bumi yang meluluh-lantakkan infrastruktur, potensi sosial dan alam, serta manusianya, adalah gempa bumi yang terjadi di DIY dan Jawa Tengah dengan kekuatan 5,9 skala richter pada tanggal 27 Mei 2006. Peristiwa ini diprediksikan mempengaruhi kelangsungan akses pendidikan, di antaranya pendidikan dasar dan menengah.

1. Kelangsungan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah setelah Gempa Bumi

Kajian ini menunjukkan bahwa dampak gempa bumi yang melanda DIY, terutama Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta yang menjadi *area of concern* penelitian ini, menyumbang angka *drop out* secara langsung. Apabila angka *drop out* di jenjang SD, SMP dan SMA, misalnya pada tahun ajaran 2005/2007 itu dibandingkan dengan jumlah siswa yang menjadi korban gempa bumi, sebesar 47% siswa untuk Bantul dan 11% siswa untuk Yogyakarta, maka diperoleh persentase *drop out* sebesar 1%. Sedangkan apabila angka *drop out* dibandingkan dengan jumlah siswa keseluruhan dalam tahun ajaran yang sama, maka diperoleh persentase *drop out* sebesar 0,3% (Bantul) dan 0,1% (Yogyakarta).

Jika pada tahun ajaran yang sama dianalisis faktor penyebab *drop out*, baik dari sisi gempa bumi maupun nongempa bumi, ternyata didapatkan persentase *drop out* sebesar 0,5% untuk sekolah di Bantul jika dibandingkan dengan siswa secara keseluruhan dan 0,3% untuk sekolah di Yogyakarta. Selanjutnya, pada tahun ajaran 2006/2007, diperoleh persentase *drop out* yang disebabkan oleh gempa bumi dan nongempa bumi sebesar 1,9% (Bantul). Artinya, ada kenaikan 1,4% dari tahun ajaran sebelumnya dan persentase *drop out* sebesar 0,2% (Yogyakarta) atau naik

Tabel 5.
Penyebab Drop Out Secara Umum Tahun Ajaran
2006/2007 (Yogyakarta)

| Kab/ Kota | Penyebab DO | SD | SMP | SMA | Frekuensi |
|--|------------------------------------|----|-----|-----|-----------|
| Y O G Y A K A R T A | Kondisi ekonomi | 0 | 0 | 0 | 0 (0 %) |
| | Kondisi fisik (meninggal/cacat) | 0 | 0 | 0 | 0 (0 %) |
| | Kondisi psikis (depresi) | 0 | 0 | 0 | 0 (0%) |
| | Lainnya | 0 | 4 | 0 | 4 (100%) |
| | Jumlah | | | | 4 (100%) |

sebesar 0,1% dari tahun ajaran sebelumnya. Kecenderungan *drop out* di atas terjadi pada semua jenjang yakni SD, SMP, dan SMA seperti yang dijelaskan dalam tabel 4, 5, 6, dan 7.

Berdasarkan tabel-tabel tersebut diketahui bahwa jumlah pembelajar *drop out* di Bantul pada tahun ajaran 2006/2007 yang didasarkan pada gempa maupun nongempa jika dibandingkan pada tahun ajaran yang sama adalah sebesar 1,9%. Dengan demikian, persentasenya meningkat dari tahun ajaran sebelumnya, yaitu 0,5%. Artinya, ada kenaikan angka *drop out* sebesar 1,4%. Sementara itu, di Yogyakarta, angka *drop out* berkisar 0,2%, yang disebabkan oleh faktor secara umum (gempa dan nongempa). Artinya, lebih tinggi sedikit angkanya, sebesar 0,1%, dibandingkan tahun ajaran sebelumnya.

Sebagian besar penyebab *drop out* masyarakat adalah alasan ekonomi. Dengan sendirinya, masalah ini didukung oleh hasil penelitian ini yang memaparkan hal-hal sebagai berikut.

- a) kisaran penghasilan orangtua/wali secara mayoritas adalah di bawah Rp. 500.000,00;
- b) titik perhatian korban gempa juga banyak beralih pada perbaikan infrastruktur yang sebagian besar belum diperbaiki;
- c) tempat usaha milik orangtua/wali pembelajar pada umumnya belum diperbaiki;
- d) sebagian kecil ada yang ditinggal mati orangtua/wali/saudara atau cacat sebagai dampak gempa sehingga tidak dapat melanjutkan peran-peran sosial-ekonomi keluarga.

Mayoritas orangtua/wali memberikan keterangan bahwa dampak gempa bumi telah membawa mereka ke dalam beban yang agak berat hingga berat. Hal ini, sebagaimana yang secara eksplisit dikatakan oleh para orangtua/wali, disebabkan antara lain oleh penghasilan yang tidak cukup dan tempat usaha/ekonomi yang belum pulih.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari data di atas adalah bahwa angka *drop out* yang muncul sebenarnya adalah "puncak dari gunung es". Artinya, di atas permukaan laut hanyalah sedikit saja, sementara itu bawah permukaan laut sejatinya "potensi" *drop out*-nya lebih besar dengan didasarkan pada alasan-alasan yang menjadi bagian dari hasil penelitian ini.

Asumsi yang didukung oleh temuan ini tentu saja membawa kepada penyimpulan sementara lainnya, yaitu bahwa pada akhirnya, daya lanjut siswa pun sebenarnya ada di "ujung tanduk" dengan sejumlah beban ekonomi relatif berat yang mereka mesti tanggung. Angka *drop out* yang muncul sebenarnya merupakan bukti tentang adanya daya tahan siswa yang melemah dalam usaha melangsungkan pendidikannya.

Tabel 6.
Beban Keluarga atas Biaya Pendidikan Akibat
Gempa Bumi (Bantul)

| Kab/ Kota | Tingkat Beban | SD | SMP | SMA | Jumlah |
|--------------|-------------------------------------|---------------|---------------|----------|-----------|
| B | Tidak memiliki | 13 (6%) | 21 (10%) | 24 (11%) | 58 (9%) |
| | Memiliki dengan tingkat: -Ringan | 39 (18%) | 35 (18%) | 29 (15%) | 614(91%) |
| | | -Agak Berat | 123 (55%) | 97 (51%) | 95 (48%) |
| | -Berat | 60 (27%) | 60 (31%) | 76 (38%) | 315 (51%) |
| | Jumlah | 235 (100%) | 213 (100%) | 0 | 196 (32%) |
| L | Jumlah | | | | 97 (100%) |

Tabel 7.
Beban Keluarga atas Biaya Pendidikan Akibat
Gempa Bumi (Yogyakarta)

| Kab/ Kota | Tingkat Beban | SD | SMP | SMA | |
|--|--|-------------|------------|------------|-----------|
| Y O G Y A K A R T A | Tidak memiliki | 4 (9 %) | 2 (4 %) | 15 (33%) | |
| | Memiliki dengan tingkat: -Ringan | 7 (18 %) | 11 (23 %) | 6 (19 %) | |
| | | -Agak Berat | 16 (55 %) | 17 (35 %) | 12 (39 %) |
| | | -Berat | 17 (27%) | 20 (42 %) | 13 (42 %) |
| | Jumlah | 44 (100 %) | 50 (100 %) | 48 (100 %) | |

2. Ikhtiar dan Kebijakan Pemerintah Setelah Gempa Bumi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa langkah-langkah yang telah ditempuh oleh pemerintah meliputi strategi langsung dan tidak langsung yang ditujukan bagi korban gempa bumi. Strategi langsung dapat berupa bantuan khusus untuk korban gempa.

Sementara itu, strategi tidak langsung adalah langkah-langkah yang secara khusus tidak ditujukan bagi korban gempa bumi tetapi memiliki efek dan dampak bagi korban gempa bumi, seperti program *retrieval*, BOS, perda tentang pedoman penerimaan peserta didik yang pro-masyarakat miskin, beasiswa keluarga miskin (gakin), program pemberian jaminan pendidikan daerah dan sebagainya.

Dengan demikian, langkah yang ditempuh oleh pemerintah secara umum memang bukan menysasar pada gempa bumi itu sendiri tetapi efek dan dampak yang ditimbulkannya, yakni persoalan sosial ekonomi, termasuk hambatan dalam mengakses pendidikan secara memadai.

Salah satu poin penting berjalannya suatu kebijakan adalah sosialisasi, tingkat pemerolehan (aksesibilitas) dan responsivitas sekolah/masyarakat atas keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sebagai suatu kasus yang ditemukan dalam penelitian ini, peraturan

tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru baik pada tahun ajaran 2006/2007 ataupun 2007/2008, dapat diakses secara baik oleh sekolah. Begitu juga respon positif sekolah untuk melaksanakan perda tersebut.

Secara jujur, memang juga mesti diakui bahwa ada kasus sekolah yang tidak menerima perda yang ditujukan bagi tiap sekolah tersebut. Kasus lainnya adalah ada sekolah yang merasa keberatan dengan perda tersebut yang dianggap memberatkan sekolah itu sendiri.

Menurut sebagian pendapat, pada saat sekolah dilarang melakukan pungutan resmi di awal pendaftaran atau penerimaan peserta didik baru, pihak pemerintah sendiri tidak secara menyeluruh mengatasi hambatan finansial sekolah. Namun, di sisi yang lain, pemerintah juga berdalih bahwa bantuan BOS sebenarnya juga digunakan untuk menutupi biaya sekolah seperti biaya pendaftaran, SPP, seragam dan sebagainya.

Hal yang perlu diberi perhatian lebih oleh pemerintah adalah bukan sekadar respon yang bernilai jangka pendek bagi orangtua/wali, seperti bantuan langsung, tetapi dibutuhkan respon yang bermakna menyeluruh. Pemerintah, sebagai sumber finansial masyarakat setelah gempa bumi, sebenarnya perlu bermain pada aras strategis, seperti alokasi anggaran pendidikan dari

APPBN dan APBD yang memenuhi standar minimum 20%. Salah langkah yang mungkin saja dilakukan oleh pemerintah akan membebani masyarakat yang dalam hal ini adalah orangtua/wati dalam membiayai pendidikan peserta didik.

Data yang diperoleh melalui wawancara menunjukkan bahwa hal-hal yang telah dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, tidak selalu sesuai dengan prosedur kebijakan yang meliputi perumusan masalah kebijakan, peramalan/formulasi kebijakan, rekomendasi, implementasi, dan penilaian kebijakan (Dunn, 1998). Misalnya, respon pemerintah dan Dinas

Pendidikan terkait dengan penanggulangan bencana gempa bumi pada tahun 2006 ternyata tidak disertai dengan evaluasi atau penilaian secara memadai atas kinerja atau implementasi kebijakan sehingga bentuk-bentuk penyimpangan tidak terdokumentasi dengan baik. Temuan dari Lembaga Ombudsman DIY (2007, h. 7-8) di antaranya menjelaskan bahwa pungutan-pungutan di luar ketentuan benar-benar dilakukan oleh beberapa sekolah di Bantul terhadap siswa korban gempa sekali pun.

Temuan lainnya juga memperlihatkan penggunaan dana BOS yang tidak sesuai dengan sasaran utamanya. Dengan demikian, tahap evaluasi implementasi kebijakan perlu dikembangkan

secara memadai oleh Dinas Pendidikan terkait.

3. Ikhtiar Sekolah

Sebagian besar sekolah melakukan koordinasi strategis dengan komite sekolah dan orangtua/wali setelah terjadinya gempa bumi. Sebagaimana diketahui, komunikasi pendidikan dan administrasi pendidikan dengan melibatkan *stakeholders*, yakni komite dan orangtua, merupakan hal yang sangat penting dewasa ini. Citra sekolah yang akomodatif terhadap aspirasi *stakeholders*-nya menandakan sekolah tersebut memiliki potensi demokratis dan transformatif dalam pengambilan keputusan.

Sekolah yang menjadi objek penelitian ini juga memiliki sumber finansial utama dari pemerintah dan hanya sebagian kecil sumber finansial dari masyarakat, bantuan donor/LSM, pinjaman dan iuran orangtua/wali. Untuk kasus sekolah swasta, tentu saja pemasukan dari masyarakat menjadi hal yang utama.

Pada tingkat pengambilan keputusan, agaknya sekolah-sekolah masih mengalami sejumlah persoalan karena pelibatan orangtua masih rendah dalam membicarakan kelangsungan akses pendidikan bagi siswa korban gempa bumi. Hal ini menyebabkan produk peraturan/kebijakan sekolah cenderung

tidak produktif dan transformatif. Tidak produktif di sini berarti bahwa peraturan tersebut tidak mendukung munculnya kreativitas sosial sedangkan tidak transformatif mengandung makna bahwa titik berangkatnya tidak dari persoalan akar rumput dan mengakomodasi *stakeholders* yang ada.

4. Ikhtiar Orangtua (Masyarakat)

Sumber penghasilan orangtua/wali masih tetap menjadi sumber pokok untuk kelangsungan pendidikan keluarganya. Sumber-sumber pendanaan yang selanjutnya diharapkan dapat mendukung adalah bantuan pemerintah, pinjaman, bantuan LSM/Ormas, dan bantuan masyarakat lainnya.

Penghasilan keluarga baik yang telah, sedang dan akan dikembangkan, diprediksi tidak akan memberikan dukungan yang optimal jika tidak terlebih dulu didukung oleh unsur luar, misalnya pemerintah atau LSM, agar perekonomian keluarganya meningkat ke arah yang lebih produktif. Hal utama yang bisa dipetik dari hal ini adalah bahwa reformasi keuangan sekolah memang tidak cukup untuk mendorong peran serta masyarakat tanpa dilakukannya reformasi kehidupan sosial-ekonomi secara keseluruhan.

5. Harapan Sekolah dan Orang Tua

Ada kebutuhan/harapan besar sekolah ke depan yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah di tengah kepingan problem kelangsungan akses pendidikan baik yang bersifat aktual maupun potensial. Kebutuhan/harapan besar tersebut antara lain menyangkut perbaikan kembali sarana dan prasarana sekolah yang secara faktual belum sepenuhnya diperbaiki. Hal lain adalah pemberian dan pemantapan program pemberian bantuan bagi masyarakat yang secara aktual maupun potensial tidak mampu melanjutkan proses pendidikan.

Harapan ini sebenarnya sejalan dengan apa yang telah, sedang, dan akan menjadi skala prioritas pemerintah, yakni akses pendidikan bagi keluarga miskin. Hal yang perlu menjadi catatan adalah bahwa fenomena liberalisasi yang melanda hampir semua sektor sosial, termasuk pendidikan, sedikit-banyak akan menjadi ancaman baru. Hal ini juga menandakan mulai melemahnya tanggung jawab negara/pemerintah atas pembangunan masyarakat secara keseluruhan termasuk dalam sektor pendidikan.

Kebutuhan dan harapan masyarakat (orangtua/wali) juga tidak keluar dari

marka persoalan yang sejatinya mereka hadapi, yakni pemberian bantuan kelangsungan pendidikan anak, pemberian bantuan langsung tunai yang memadai, dan bantuan modal/usaha ekonomi.

Kebutuhan orangtua/wali terhadap subsidi ini tentu saja tidak bisa dilepaskan dari beban sosial-ekonomi yang dialami oleh masyarakat. Kebijakan pemberian bantuan, khususnya pendidikan, merupakan sesuatu yang terus ditunggu-tunggu karena memang tanpa hal itu semua "puncak gunung es" kelangsungan akses pendidikan semakin tampak permukaan, yakni membengkaknya masyarakat yang tidak bisa melanjutkan pendidikan dan angka *drop out* akan semakin tinggi.

6. Rekomendasi Kebijakan

Ada beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat ditetapkan dan diajukan dengan memanfaatkan data yang telah diperoleh dalam penelitian ini. Rekomendasi tersebut diarahkan pada pihak-pihak yang berkepentingan dengan upaya kelangsungan pendidikan bagi korban gempa di Bantul dan Yogyakarta. Rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Pemerintah (Pusat), berupa perlunya penanganan dampak dan korban bencana alam, termasuk gempa bumi, secara antisipatif dan berkelanjutan. Program-program nasional yang telah berjalan seperti BOS, *retrieval*, dan beasiswa bagi keluarga miskin masih perlu dilanjutkan, namun ke depan perlu dipikirkan langkah-langkah yang tidak parsial melainkan menyeluruh (integral).
- b. Pemerintah Daerah (Provinsi) perlu melakukan langkah antisipatif dan menyediakan anggaran yang memadai dalam menangani korban dan dampak gempa bumi, mengusahakan agar APBD sebesar minimal 20% dialokasikan untuk sektor pendidikan, dan perlu membuat jejaring informasi pendidikan untuk kelangsungan akses pendidikan antardaerah di DIY.
- c. Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) perlu melibatkan *stakeholders* dalam penyempurnaan kebijakan pendidikan terutama yang terkait dengan kelangsungan akses pendidikan dasar dan menengah, memutakhirkan data siswa yang menjadi korban gempa bumi secara khusus atau masyarakat miskin secara umum, mengembangkan sistem evaluasi kebijakan pendidikan yang memadai, dan mengintensifkan penanganan atas siswa korban gempa bumi yang mengalami hambatan kelangsungan akses pendidikan dasar dan menengah secara integratif dengan perbaikan sektor lain, terutama pemulihan ekonomi.

- d. Sekolah, berupa perlunya koordinasi, komunikasi, dan *sharing* dengan *stakeholders* dalam mengatasi problem kelangsungan akses pendidikan siswa, perluasan jangkauan sumber-sumber finansial untuk kelangsungan akses pendidikan, dan perlunya sistem *saving* atau investasi anggaran di level sekolah untuk mengurangi beban anggaran pada saat-saat tertentu.

SIMPULAN

Peristiwa gempa bumi Mei 2006 yang melanda DIY telah menyebabkan melemahnya kelangsungan akses pendidikan dasar dan menengah. Angka *drop out* yang tampak adalah bagian kecil dari potensi *drop out* yang sebenarnya dapat terjadi. Ini semua diukur dari tingkat penghasilan yang relatif rendah, tempat usaha yang belum pulih setelah dilaksanakannya rekonstruksi, titik perhatian masih diarahkan pada perbaikan infrastruktur-fisik dan sebagian kecil disebabkan oleh meninggalnya kepala keluarga atau saudara sebagai pencari nafkah utama keluarga.

Peran pemerintah, baik pusat maupun daerah, ternyata telah secara signifikan menekan angka *drop out* siswa korban gempa bumi melalui program-program yang secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan untuk

mengatasi rendahnya angka kelangsungan pendidikan.

Tantangan ke depan adalah menyangkut *sustainability* (kesinambungan) program-program yang langsung bersentuhan dengan kelompok masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Apabila program pro-rakyat itu berkurang atau berhenti sama sekali, maka akan terjadi pembengkakan angka *drop out* dan dengan sendirinya kelanjutan pendidikan pun berhenti di tengah jalan.

Langkah-tangkah strategis sebenarnya telah dilakukan oleh sekolah, terutama membangun komunikasi dengan *stakeholders* seperti komite sekolah dan orangtua. Hanya saja, aturan ini belum banyak dimanfaatkan untuk membicarakan hal-hal yang secara mendasar dapat mempengaruhi peningkatan kelangsungan akses pendidikan secara khusus atau pengembangan sosio-ekonomis sekolah pada umumnya. Sementara itu, pihak orangtua/wali (masyarakat) juga masih memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap program pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, Saiful, 2005. *Indra Djati Sidi Dori ITB untuk pembaruan pendidikan*. Bandung: Teraju.
- Atkin, Marvin C. (Ed.), 1992. *Encyclopedia of educational research*. New York: Macmillan Publishing Company.
- Balai Pustaka, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Bambang PH, 2006. *Retrieval dan beasiswa*. [Online] Tersedia di <http://www.lip-diy.or.id>. [Diakses pada tanggal 20 Agustus 2007].
- Bisnis Indonesia*, 1/11/ 2005).
- Darmaningtyas, 1999. *Pendidikan pada dan setelah krisis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Depdiknas, 2005. *Rembu pimpinan rencana strategis Departemen Pendidikan Nasional tahun 2005-2009*. Jakarta: Depdiknas.
- Dunn, William N., 1998. *Pengantar analisis kebijakan*. Edisi kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, Agus et al., 2003. *Reformasi tata pemerintahan dan otonomi daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada.
- Fakih, Mansour, 1996. *Masyarakat sipil untuk transformasi sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harwani, Amiarsi. *Data korban gempa DIY*. [Online] Tersedia di www.mcsatkorlak.info. [Diakses pada tanggal 19 Mei 2007].
- Jalal, Fasli & Supriadi, Dedi, 2001. *Reformasi pendidikan dalam konteks otonomi daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Kedaulatan Rakyat*, 3/08/2006; 21/05/2007.
- Keputusan Bupati Bantul Nomor 329 Tahun 2006 tentang Penggabungan dan Ganti Nama Kelembagaan SD di Kabupaten Bantul Tahun 2006.
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Nomor 188 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah.
- Kompas*, 6/2/2002; 6/11/2004.
- Lembaga Ombudsman Daerah DIY. 2007. "Menuju pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel dan partisipatif." *Jurnal Ombudsman Daerah*. Edisi 9, 2007.
- Mariana, Dina. *Advokasi pendidikan pascagempa*. [Online] Tersedia di www.ireyogya.org. [Diakses pada tanggal 19 Mei 2007].
- Mastuhu, 2003. *Menata ulang pemikiran sistem pendidikan nasional dalam abad 21*. Yogyakarta: Safiria Insania Press dan Program Pascasarjana Magister Studi Islam Ull.
- Mudyahardjo, Redja, 2002. *Pengantar pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nasiwan, 2003. "Analisis kebijakan pendidikan di Kabupaten Bantul." Penelitian tidak dipublikasikan. Yogyakarta: FISE Universitas Negeri Yogyakarta.
- Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan DPRD Kota Yogyakarta Tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2006.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kantor Departemen Agama Kabupaten Bantul Tahun Pelajaran 2007/2008.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2006-2010.
- Peraturan Gubernur DIY Nomor Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK dan Sekolah di Provinsi DIY Tahun Pelajaran 2007/2008.
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 30 tahun 2007 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK dan Sekolah di Kota Yogyakarta.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah.

Purnomo, Agus, dkk, 2000. *Merubah kebijakan publik*. Yogyakarta: REaD Books.

Pusat Bahasa, 2002. *Kamus besar bahasa Indonesia edisi ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2001.

Rencana Strategik Satuan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2007-2011.

Sukmadinata, Nana Syaodih, 2005. *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Supriadi, Dedi, 2004. *Satuan biaya pendidikan dasar dan menengah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Suryadi, 2000. *Profit dunia pendidikan di saat krisis ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Swanto, 2005. "Indonesian education in comparison of Southeast Asian countries." *Jurnal Studi Sosial* Vol. 1 No.1. Agustus 2005.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003.

World Bank, 2006. *Ringkasan eksekutif tentang bencana alam di Indonesia*. Keputusan Resmi World Bank.